



# **RANCANGAN AWAL**

## **RENJA 2026**

**RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur  
Jambi**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi kinerja dalam kurun waktu satu tahun.

Rencana Kerja Tahunan ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaian indikator kinerja dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi. Selanjutnya Rencana Kerja Tahunan ini dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya apabila dengan dedikasi dan kerja terutama semua

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, menyadari masih terdapat kekurangan - kekurangan di dalam penyampaianya. Oleh sebab itu, segala saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja Tahunan yang akan datang.

Kepada seluruh Staf Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi yang telah berpartisipasi di dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi ini, kami ucapkan terima kasih.

Jambi, Januari 2025

**DIREKTUR**

**drq. Iwan Hendrawan**

Pembina Tk. I

NIP. 19740729 200604 1 010

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSJD Kolonel H.Muhammad Syukur Jambi.....	18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	
2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD .....	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	40
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional .....	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSJS Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi.....	41
3.3. Program dan Kegiatan	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	60
BAB V PENUTUP.....	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen rencana kerja dengan waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan rencana strategis SKPD untuk tahun rencana yang dimaksud.

Fungsi rencana kerja adalah menerjemahkan, mengoperasionalkan rencana strategis SKPD ke dalam program dan kegiatan tahunan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renja SKPD.

Dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahun 2025 berupa program dan kegiatan yang diusulkan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi yang telah ditetapkan. Selain itu, penyusunan rencana kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi Tahun 2025 mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2025.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan idiil dalam penyusunan Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi sebagai penjabaran RENSTRA Provinsi Jambi ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu:

1. Undang - undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957

- menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
  23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 nomor 7);
27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perencanaan Kerja RS Jiwa Daerah (RSJD) Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan RS Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi jangka pendek (1 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan RS Jiwa Daerah (RSJD) Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi. Rencana Kerja RS Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi disusun sesuai tugas dan fungsi RS Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi dengan menyesuaikan kepada Rencana Instansi SKPD Provinsi Jambi.

Rencana Kerja RS Jiwa Daerah (RSJD) Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi Tahun 2025 mempunyai peranan penting, terutama dalam penyusunan Rencana dalam melakukan kegiatan di RS Jiwa Daerah (RSJD) Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi

Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V. PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi Tahun 2024 harus dilakukan evaluasi. Hasil Evaluasi tersebut menjadi masukan dalam penyusunan Renja di Tahun berikutnya.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2024 sebesar Rp. 70.707.120.274,- dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 41.549.043.885,-. Realisasi anggaran untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Rp.63.890.440.561,- dari total anggaran Rp. 3.370.604.800,-, sedangkan realisasi untuk program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat Rp. 6.816.679.713,-. Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagai berikut :

1. APBD Belanja Langsung sebesar Rp. 34.442.050.410,-
2. APBD Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 39.876.714.859,-

Realisasi anggaran yang dikelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran belanja langsung APBD untuk program utama sebesar Rp. 6.816.679.713,- dari total anggaran yang dialokasikan untuk program utama sebesar Rp. 6.862.261.684,-.
2. Realisasi anggaran program pendukung sebesar Rp. 63.890.440.561,- dari total anggaran yang dialokasikan untuk program pendukung sebesar Rp. 67.456.503.585,-
3. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 31.922.949.539,- (97,13%) dari total anggaran yang dialokasikan kepada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 32.864.688.561,-.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100 % menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja serta analisis efisiensi pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026  
Provinsi Jambi**

**Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02													
1	02	01	1											
1	02	01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	70,08	71	71.95	101,34	71	213,03	2.50	
1	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan	100	%	100	100	75	75,00	100	275	2,78







						<b>Tingkat daerah Provinsi</b>									
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4	dok	4	4	3	75,00	4	11	2,75

### Analisis efesiensi (RSJD ) Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	100	63.890.440.561,00	
2	Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja	Predikat AKIP	100,11	-	
3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Nilai IKM	100	6.816.679.713,00	
Belanja langsung pendukung				33.796.291.043	47,80%
Belanja tidak langsung				36.910.829.231	
<b>Jumlah belanja langsung</b>				33.796.291.043	
<b>Total Belanja</b>				70.707.120.274	

Sumber : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, 2024

Efisiensi pengelolaan APBD berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Implementasi pengukuran efisiensi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD ) Kolonel H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi Tahun 2024, dilakukan melalui perhitungan rasio antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja keseluruhan. Rumus menghitung tingkat efisiensi menurut Mahsun (2009) :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327

Tahun 1996, hasil persentase dikategorikan kedalam beberapa tingkatan :

- Tingkat pencapaian diatas 100 % : tidak efisien
- Tingkat pencapaian 90% - 100% : kurang efisien
- Tingkat pencapaian antara 80% - 90% : cukup efisien
- Tingkat pencapaian dibawah 60% : sangat efisien

Berdasarkan tabel 3.12 dapat digambarkan bahwa realisasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan dalam pencapaian sasaran Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD ) Kolonel H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi tahun 2024 sangat efisien dalam penggunaannya, hal tersebut terlihat dalam penyerapan anggaran sebesar 47,8 %. Hal ini akan menjadi perhatian Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD ) Kolonel H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi, agar kedepannya efisiensi anggaran dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana.

Pada tahun 2024,Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD ) Kolonel H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi yang masuk ke dalam BLUD sebesar Rp. 18.448.856.775,- dan terdapat dana silpa sebesar Rp. 3.517.974.636,-, berikut ditampilkan tabel rincian target dan pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 :

**Rekapitulasi Penerimaan**

**Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2024
1	BPJS KES	Rp. 11.582.447.318,-
2	NON BPJS KES	Rp. 2.199.362.997,-
3	PELAYANAN KESEHATAN	Rp. 4.500.099.288,-
4	JASA LAYANAN LAIN YANG SAH	Rp. 77.634.500,-
5	JASA GIRO	Rp. 89.312.672,-
<b>JUMLAH</b>		Rp. <b>18.448.856.775,-</b>

**Rekapitulasi Penerimaan Pelayanan Rawat Inap**

**Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024**

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023
1	Perawatan	Rp. 828.253.794

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023
2	Visite Dokter Spesialis	Rp. 21.285.000
3	Visite Dokter Umum	Rp. 23.095.000
4	Jasa Evaluasi Psikolog	Rp. 590.000
5	Visum	Rp. 1.500.000
6	Jasa Sarana	-
7	Jasa Pelayanan	-
8	Laboratorium	Rp. 21.687.200
9	Gigi	Rp. 190.000
10	Fixasi & Tindakan Lain	Rp. 722.000
11	Rehabilitasi Mental / Asesmen	Rp. 4.330.000
12	Asuhan Keperawatan	Rp. 9.682.500
13	Terapi Aktivitas Individu	Rp. 22.721.500
14	Terapi Aktivitas Kelompok	Rp. 8.255.000
15	Terapi Aktivitas Keluarga	Rp. 1.797.500
16	Terapi Aktivitas Insentif	Rp. 2.462.500
17	Karcis / ADM	Rp. 3.160.000
18	Obat-obatan	Rp. 55.705.187
19	Intervensi Psikososial	Rp. 37.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 1.042.437.181</b>

### Rekapitulasi Penerimaan Pelayanan Rawat Jalan

**Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Provinsi**

**Jambi Tahun Anggaran 2024**

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023
1	Konsultasi Spesialis Jiwa	Rp. 379.505.000
2	Konsultasi Spesialis Syaraf	Rp. 162.776.947
3	Konsultasi Spesialis Anak	Rp. 3.200.000
4	Konsultasi Spesialis Penyakit Dalam	Rp. 3.400.000
5	Konsultasi Spesialis Bedah	Rp. 400.000
6	Konsultasi Spesialis Akupunktur	Rp. 53.320.000
7	Rehab Medik	Rp. 15.710.000

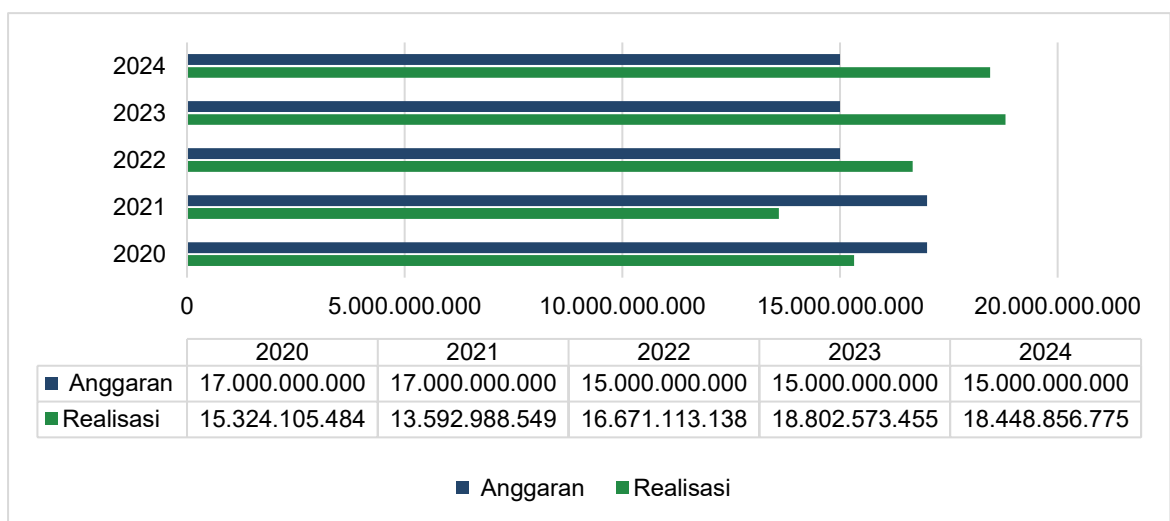
NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023
8	Konsultasi Gigi & Mulut	Rp. 102.191.000
9	Tindakan Medik MMPI	Rp. 392.960.000
10	Laboratorium	Rp. 591.318.440
11	Klinik Psikologi	Rp. 105.600.000
12	Fisiotherapi	Rp. 81.545.000
13	Terapi Okupasi	Rp. 101.795.000
14	Medical Logic / Visum	Rp. 61.680.000
15	Legalisir	Rp. 697.500
16	Surat Keterangan Sakit / SKBN	Rp. 1.556.500
17	Radiologi	Rp. 8.615.000
18	Karcis IPWL / IGD / Ambulance	Rp. 9.340.714
19	Jasmani	Rp. 20.820.000
20	Metadhon (PTRM)	Rp. 5.096.000
21	Obat	Rp. 928.914.666
22	Sewa Kantin / Rumah Jamur	Rp. 18.895.340
23	Gedung Koperasi / Hall	Rp. 16.100.000
24	Photocopy	Rp. 7.750.000
25	Parkir	Rp. 21.393.000
26	Tempat Penitipan Anak (TPA)	Rp. 9.627.000
27	Diklat	Rp. 353.275.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 3.457.662.107</b>

**Tabel Rincian Target dan Realisasi Pendapatan 2024**

No	Rincian Penerimaan	Target Penerimaan	Realisasi
1	Pelayanan Rawat Jalan	Rp. 2.550.000.000,-	Rp. 3.457.662.107
2	Pelayanan Rawat Inap	Rp. 2.000.000.000,-	Rp. 1.042.437.181
3	BPJS Kesehatan	Rp. 7.250.000.000,-	Rp. 11.582.447.318
4	NON BPJS Kes	Rp. 3.000.000.000,-	Rp. 2.199.362.997

5	JASA LAYANAN LAIN YANG SAH	Rp. 150.000.000,-	Rp. 77.634.500
6	Jasa Giro	Rp. 50.000.000,-	Rp. 89.312.672
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 15.000.000.000,-</b>	<b>Rp. 18.448.856.775,-</b>

Tahun 2024 persentase pencapaian penerimaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi sampai dengan bulan Desember meningkat di banding tahun sebelumnya di bulan yang sama. Berikut ditampilkan grafik pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi selama lima tahun:



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian

tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

#### Skala Nilai Peringkat Kerja

No.	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi	Kode
1.	91≤100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76≤90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66≤75	Sedang	Kuning Tua
4.	51≤65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

#### Capaian Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% capaian	KRITERIA/ KODE WARNA
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	70.08	Kuning Tua
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Nilai IKM	Nilai	85	85	100	Hijau Tua

Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi memiliki dua (2) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi. Pada tahun 2024, indikator sasaran

tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan (**tercapai < 100%**) dari total indikator dengan persentase capaian sebesar **85 %**.

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Predikat SAKIP	AA	Predikat AKIP Perangkat daerah	B	B	B	B	B	B	BB		
2	Nilai IKM	100	Nilai IKM	>71	84	85	85	83	84,77	85		

## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### 2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSJD Provinsi Jambi

Setelah lebih dari 76 tahun Negara Indonesia merdeka, ternyata berbagai permasalahan pada bangsa ini selalu terjadi, tidak hanya permasalahan politik, kedaulatan NKRI, moral bangsa, masalah pendidikan termasuk juga masalah kesehatan.

Masalah kesehatan jiwa masyarakat yang sering terjadi dan menjadi catatan tersendiri oleh pemerintah adalah maraknya kasus bunuh diri, kejahatan seksual baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa, masalah meningkatnya angka penyalahgunaan NAPZA, masih tingginya angka penderita gangguan mental ringan Depresi 6,1%, Gangguan Mental Emosional 9,8% serta masih tingginya angka penderita gangguan jiwa berat di Indonesia, 6,7 permil rumah tangga di Indonesia memiliki anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa skizofrenia/psikosis. angka orang dengan gangguan jiwa berat yang pernah dipasung masih sebesar 14,0%

dari jumlah ODGJ yang ada dengan tingkat pasung di pedesaan lebih besar dari perkotaan(17,7% vs 10,7%) (Riskesdas, 2018).

Untuk mengatasi semua permasalahan di atas, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Rencana Strategi tahun 2020-2024, yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang kuat, hal ini ditandai dengan penduduknya hidup dengan berperilaku sehat dan dalam lingkungan yang sehat memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan Pemerintah menerbitkan Undang – Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014 dimana upaya kesehatan jiwa bertujuan untuk :

1. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.
2. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan.
3. Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia.
4. Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ.
5. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa.
6. Meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk

dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia.

Saat ini berbagai masalah kesehatan juga sering terjadi dalam wilayah Provinsi Jambi, antara lain : banyaknya warga miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan, belum semua Puskesmas dan RS yang menyediakan pelayanan kesehatan jiwa dan masih terdapat orang dengan gangguan jiwa berat yang terlantar dan yang di pasung. Berdasarkan data dari hasil Riskesdas 2018, bahwa di Provinsi Jambi bahwa proporsi rumah tangga dengan anggota memiliki gangguan jiwa skizofrenia/psikosis adalah sebesar 6,6 permil, lebih rendah 0,1 permil bila dibandingkan dengan proporsi secara nasional. Prevalensi penyakit jiwa lainnya adalah:

1. Depresi, 1,8%; Nasional 6,1%.
2. Gangguan Mental Emosional 3,6%; Nasional 9,8%.

Selain permasalahan di atas, beberapa isu lain yang terkait masalah kesehatan jiwamasyarakat adalah adanya stigma buruk masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan jiwanya.

Berdasarkan data dan informasi di atas, permasalahan dalam pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Jambi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum semua Puskesmas dan RS di kabupaten/kota yang membuka layanan jiwa.
2. Seringnya penolakan rujukan untuk pelayanan kesehatan non-jiwa ODGJ oleh RSlain di wilayah kerja RSJD Provinsi Jambi sedangkan SDM, sarana dan prasarana RSJD pendukung pelayanan kesehatan non-jiwa masih terbatas.
3. Belum optimalnya upaya promotif terkait kesehatan jiwa dan rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA.
4. Kecenderungan pasien untuk memilih RS, yang didasari pertimbangan faktor biaya (murah) sampai pada faktor fasilitas RS (fisik megah, pelayanan spesialisik dan sub-spesialistik,

- penggunaan peralatan dengan teknologi canggih dan mutakhir).
5. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cepat dan lengkap serta bermutu sehingga perlu profesionalisme pemberi layanan kesehatan.
  6. Profesionalisme kinerja SDM yang belum optimal dengan pelaksanaan *rewards* dan *punishments* yang jelas juga dirasakan masih kurang.
  7. Sistem layanan dan informasi yang belum optimal mengingat kemajuan teknologi informasi yang pesat sehingga RS perlu memperhatikan pentingnya manajemen sistem informasi, agar dapat digunakan untuk layanan monitoring dan evaluasi digital dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada pasien.
  8. Manajemen aset RS sebagai pendukung pelayanan kesehatan yang bermutu yang masih belum optimal.

Permasalahan yang akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan oleh RSJD Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Pelaksanaan Mutu Pelayanan kesehatan yang belum sesuai standar pelayanan optimal
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal karena kurang memadainya peralatan kesehatan dan belum sesuai dengan standar kelas RS)
3. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya manusia (tenaga medis, non medis, fungsional dan tenaga administrasi) belum sesuai standar sehingga perlu ditingkatkan secara kontinue dan berkesinambungan.
4. Belum adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi
- 5.

**Tabel 2.3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan  
Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Di RSJD  
Provinsi Jambi**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwadan non-jiwa	Belum semua Puskesmas dan RS dikabupaten/kota yang membuka layanan jiwa.	Mutu Pelayanan Kesehatan belum Memadai
	Seringnya penolakan rujukan untuk pelayanan kesehatan non-jiwa ODGJoleh RS lain di wilayah kerja RSJD Provinsi Jambi sedangkan SDM, sarana dan prasarana RSJD pendukung pelayanan kesehatan non-jiwa masih terbatas.	
	Belum optimalnya upaya promotif terkait kesehatan jiwa dan rehabilitasipenyalahgunaan NAPZA.	
Pemanfaatan sarana prasarana belum optimal	Kecenderungan pasien untuk memilih RS, yang didasari pertimbangan faktorbiaya (murah) sampai pada faktor fasilitas RS (fisik megah, pelayanan spesialisik dan sub-spesialistik, penggunaan peralatan dengan teknologi canggih dan mutakhir).	Jumlah Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai
	Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cepat dan lengkap serta bermutu sehingga perluprofesionalisme pemberi layanan kesehatan.	

Rendahnya profesionalisme SDM	Profesionalisme kinerja SDM yang belum optimal dengan pelaksanaan rewards dan punishments yang jelas juga dirasakan masih kurang.	Jumlah dan jenis SDM belum memenuhi standar
Sistem Informasi belum optimal	Sistem layanan dan informasi yang belum optimal mengingat kemajuan teknologi informasi yang pesat sehingga RS perlu memperhatikan pentingnya manajemen sistem informasi, agar dapat digunakan untuk layanan monitoring dan evaluasi digital dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada pasien	SIM RS yang belum terintegrasi
	Manajemen aset RS sebagai pendukung pelayanan kesehatan yang bermutu yang masih belum optimal.	

### 2.3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan masih banyaknya penduduk yang rentan dan hidup di bawah garis kemiskinan, dan tingkat pengangguran masyarakat yang cukup tinggi, dan adanya kecenderungan pasien untuk memilih RS, yang didasari pertimbangan faktor biaya (murah) sampai pada faktor fasilitas RS (fisik megah, pelayanan spesialisik dan sub-spesialistik, penggunaan peralatan dengan teknologi canggih dan mutakhir), sementara masyarakat semakin sadar akan hak-haknya sebagai pasien serta cenderung menyukai menempuh jalur hukum apabila ada hal-hal yang dianggapnya tidak benar dalam pelayanan RS yang diberikan kepadanya serta keinginan masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan cepat dan lengkap serta bermutu , maka permasalahan yang terseleksi sebagai isu strategis adalah sebagai berikut :

### **2.3.3 Isu Strategis yang terkait Mutu Pelayanan**

1. Belum tersedianya sub-spesialistik kesehatan jiwa di Provinsi Jambi.
2. Belum tersedianya dokter spesialis tetap/full time untuk pelayanan spesialis radiologi, spesialis anak dan spesialis penyakit kulit dan kelamin untuk memenuhi standar pelayanan RS.
3. Jumlah SDM PNS masih sangat terbatas, sehingga RS perlu merekrut tenaga kontrak dan menambah pembiayaan RS.
4. Profesionalisme SDM yang belum optimal dengan pelaksanaan reward dan punishment yang jelas juga dirasakan masih kurang.
5. Belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan yang memenuhi standar RS.
6. Manajemen aset RS sebagai pendukung pelayanan kesehatan yang bermutu yang masih belum optimal.

### **2.3.4 Isu Strategis yang terkait sektor lain/*stakeholders* lain**

1. Adanya program jaminan kesehatan nasional tetapi belum memiliki mekanisme pelayanan maupun pembiayaan yang proporsional terutama bila dibandingkan dengan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan.
2. Belum semua Kabupaten/Kota menganggarkan pembiayaan untuk pasien miskin atau terlantar melalui Jaminan Kesehatan Daerah yang belum terakomodir oleh BPJS. Hingga saat ini, hanya satu kabupaten yang menganggarkan Jamkesda (Kabupaten Tebo).
3. Sistem layanan yang belum optimal mengingat kemajuan teknologi informasi yang pesat sehingga RS perlu memperhatikan

pentingnya manajemen sistem informasi, agar dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pasien.

4. Masih banyaknya penduduk yang rentan dan hidup dibawah garis kemiskinan, dan tingkat pengangguran masyarakat yang cukup tinggi yang kemungkinan besar dapat mengancam kesehatan jiwa masyarakat tersebut.
5. Minimnya Peran lintas sektor terkait dalam memberikan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan, peningkatan derajat kesehatan jiwa masyarakat.

### **2.3.5 Isu Strategis terkait pelanggan**

1. Masyarakat semakin sadar akan hak-haknya sebagai pasien serta cenderung menyukai menempuh jalur hukum apabila ada hal-hal yang dianggapnya tidak benar dalam pelayanan RS yang diberikan kepadanya.
2. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cepat dan lengkap serta bermutu sehingga perlu profesionalisme pemberi layanan kesehatan.
3. Kecenderungan pasien untuk memilih RS, yang didasari pertimbangan faktor biaya (murah) sampai pada faktor gaya hidup (fisik megah, pelayanan spesialistik, penggunaan peralatan dengan teknologi canggih).

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

**Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026  
Provinsi Jambi**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Predikat SAKIP</b>	<b>B</b>	<b>Rp. 67.818.790.00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Predikat SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>Rp. 68.954.470.436</b>	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSJD Provinsi Jambi	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	85%	Rp. 290.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSJD Provinsi Jambi	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	-	290.000.000	
1.1	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 dok	Rp. 135.000.000	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	135.000.000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 dok	Rp. 40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	-	40.000.000	

			Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
1.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	Rp. 115.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	115.000.000	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 42.820.150.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 44.330.525.480</b>	
2.1	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.300 org/bln	Rp. 42.820.150.000	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.300 org/bln	Rp. 44.330.525.480	
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>95%</b>	<b>Rp. 507.950.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	-	<b>551.147.000</b>	
3.1	Pengadaan pakaian dinas & atributnya	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	465 paket	Rp. 302.250.000	Pengadaan pakaian dinas & atributnya	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	302.250.000	

3.2	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	47 org	Rp. 205.700.000	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	248.897.000	
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan</b>	<b>96%</b>	<b>Rp. 907.500.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan</b>	-	<b>1.098.075.000</b>	
4.1	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 paket	Rp. 302.500.000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	366.025.000	
4.2	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	Rp. 363.000.000	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	439.230.000	
4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 paket	Rp. 242.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	292.820.000	
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan</b>	<b>98%</b>	<b>Rp. 7.488.690.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan</b>	<b>98%</b>	<b>5.510.332.696</b>	

5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	Rp. 4.840.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	5.856.400	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	Rp. 1.391.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	Rp. 1.234.209.496	
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	Rp. 6.092.350.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	Rp. 4.276.123.200	
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>95 %</b>	<b>Rp. 1.754.500.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>95 %</b>	<b>2.113.612.610</b>	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	50 unit	Rp. 484.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	-	585.640.000	

			Dibayarkan Pajaknya					Dibayarkan Pajaknya			
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Rp. 1.270.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2.113.612.260	
7	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ</b>	<b>84 %</b>	<b>Rp. 14.000.000.000</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ</b>	<b>85 %</b>	<b>17.000.000.000</b>	
7.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit	Rp. 14.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit	17.000.000.000	
8	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan</b>	<b>90 %</b>	<b>Rp. 50.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan</b>	-	<b>50.000.000</b>	
8.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	Rp. 50.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	50.000.000	

B	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	RSJD Provinsi Jambi	Nilai IKM	84	Rp. 32.019.888.113	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	RSJD Provinsi Jambi	Nilai IKM	84	6.786.696.978	
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	RSJD Provinsi Jambi	Persentase Fasilitas Pelayanan, sarana & prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi	95 %	Rp. 23.609.888.113	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	RSJD Provinsi Jambi	Persentase Fasilitas Pelayanan, sarana & prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi	95 %	4.526.316.978	
1.1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi rasio Tempat Tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 : 1000	0 unit	-	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi rasio Tempat Tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 : 1000	-	-	
1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Yang Dilakukan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan	1 unit	Rp. 3.367.427.760	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Yang Dilakukan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan	-	3.367.427.760	

			Oleh Rumah Sakit					Oleh Rumah Sakit			
1.3	Pengadaan Sarana di fasilitas layanan kesehatan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	5 unit	Rp. 9.159.189.453	Pengadaan Sarana di fasilitas layanan kesehatan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	-	19.626.695.500	
1.4	Pengadaan Prasarana fasilitas layanan kesehatan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Prasarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	25 unit	Rp. 230.000.000	Pengadaan Prasarana fasilitas layanan kesehatan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Prasarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	-	250.000.000	
1.5	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Alat Kesehatan, Alat Penunjang Medik, Fasilitas Kesehatan Yang Disediakan	5 unit	Rp. 1.500.000.000	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Alat Kesehatan, Alat Penunjang Medik, Fasilitas Kesehatan Yang Disediakan	3 unit	1.600.000.000	
1.6	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ regional maintenance center yang disediakan dan dipelihara	15 unit	Rp. 121.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ regional maintenance center yang disediakan dan dipelihara	-	146.410.000	
1.7	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk)	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis	38 paket	Rp. 423.500.000	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis	-	512.435.000	

	dan Bahan Habis Pakai Lainnya)		Pakai Lainnya) yang Disediakan			dan Bahan Habis Pakai Lainnya)		Pakai Lainnya) yang Disediakan			
1.8	Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4 unit	Rp. 121.000.000	Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	146.410.000	
1.9	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, makanan & minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	2 paket	Rp. 8.687.770.900	Pengadaan Obat, Vaksin, makanan & minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	2 paket	Rp. 4.526.316.978	00
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	RSJD Provinsi Jambi	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	95 %	Rp. 7.540.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	RSJD Provinsi Jambi	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	95 %	Rp. 2.260.380.000	
2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	0 dok	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	-	-	

2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4 dok	Rp. 4.550.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4 dok	Rp. 2.260.380.000	
2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAZPA	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Penyalahguna NAZPA yang mendapatkan Rehabilitasi Medis	24 dok	Rp. 1.850.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAZPA	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Penyalahguna NAZPA yang mendapatkan Rehabilitasi Medis	-	1.900.000.000	
2.4	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 orang	-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	
2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 dok	Rp. 150.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 dok	Rp. 160.000.000	
2.6	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 orang	Rp. 120.000.000	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	130.000.000	
3	<b>Penyelenggaraa n Sistem Informasi</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase Penyelenggara an Sistem</b>	<b>97 %</b>	<b>Rp. 600.000.000</b>	<b>Penyelenggaraa n Sistem Informasi</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase Penyelenggara an Sistem</b>	<b>-</b>	<b>600.000.000</b>	

	<b>Kesehatan Secara Terintegrasi</b>		<b>Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>			<b>Kesehatan Secara Terintegrasi</b>		<b>Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>			
3.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dok	Rp. 270.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		<b>330.000.000</b>
3.2	Pengadaan Alat / Perangkat Sistem Informasi dan Jaringan Internet	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi dan Jaringan Internet Yang Tersedia	2 alat	Rp. 330.000.000	Pengadaan Alat / Perangkat Sistem Informasi dan Jaringan Internet	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi dan Jaringan Internet Yang Tersedia	-		<b>270.000.000</b>
4	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan akreditasi</b>	<b>98 %</b>	<b>Rp. 270.000.000</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>RSJD Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan akreditasi</b>	-		<b>270.000.000</b>
4.1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 dok	Rp. 270.000.000	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	RSJD Provinsi Jambi	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	-		<b>270.000.000</b>



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>N</b>	<b>I</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.

Perumusan rencana strategis dilakukan melalui proses/tahapan tentang ketentuan yang menghasilkan sebuah perencanaan pembangunan yang mencerminkan kebutuhan nyata. Secara prinsip terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi dalam penyusunan rencana strategis yaitu identifikasi isu-isu penting melalui analisa masalah, penentuan visi dan misi, penentuan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program/kegiatan.

Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi merupakan hasil penjabaran visi dan misi dan program Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi selama lima tahunan. Visi dan misi tersebut dikumpulkan melalui strategi yang dijabarkan ke dalam bentuk sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai dalam melaksanakan arah kebijakan dan program-program kesehatan.

Penyusunan Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan seperti keluarga miskin.

Perencanaan Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 adalah dokumen perencanaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi

Jambi. Rencana Startegis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi disusun sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dengan menyesuaikan kepada Rencana Strategis Provinsi Jambi.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi**

#### Tujuan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi RSJD Kolonel Inf. H.M. Syukur Provinsi Jambi, Tujuan pelaksanaan Program dan Kegiatan RSJD Kolonel Inf. H.M. Syukur yang tertuang dalam Renstra ini dirumuskan sebagai berikut:

***“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Umum Yang Paripurna Berbasis Digital dan Responsif Terhadap Tuntutan Masyarakat”***

#### Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yang memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Adapun sasaran tersebut adalah :

1. Meningkatkan mutu Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa
2. Masyarakat paham dan peduli serta kesehatan jiwa
3. Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar
4. Sistem keuangan rumah sakit yang transparan dan akuntabel
5. Jumlah, jenis dan kualitas SDM sesuai standar dan merupakan budaya kerja aparatur
6. Mewujudkan rs jiwa sebagai tempat praktek magang, penelitian oleh institusi Pendidikan

### **3.3 Program dan Kegiatan**

#### **3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

**Tujuan** : Meningkatkan kinerja aparatur dalam administrasi keuangan, umum, jasa penunjang dan pengelolaan administrasi barang yang efektif, efisien dan akuntabel.

**Sasaran** : Tercapainya kinerja aparatur dalam administrasi keuangan, umum, jasa penunjang dan pengelolaan administrasi barang yang efektif, efisien dan akuntabel.

**Kegiatan :**

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  1. Pengadaan Pakaian Dinas & Atributnya
  2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor
  2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah
  1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  2. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
- h. Peningkatan Pelayanan BLUD

## 1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

### 3.3.2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya

#### Kesehatan Masyarakat

Tujuan : Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam penunjang sistem pelayanan prima.

Sasaran : Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam penunjang sistem pelayanan prima.

Kegiatan :

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
  1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
  2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
  3. Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
  4. Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
  5. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
  6. Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
  7. Pengadaan Obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya.
- b. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
  1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
  2. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
  3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK).
  4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan Napza
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Integrasi
  1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

2. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
  1. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026  
dan Prakiraan Maju Tahun 2026  
Provinsi Jambi**

**Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		RSJD Prov Jambi						
	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN</b>		RSJD Prov Jambi		<b>Rp. 75.741.167.414</b>				<b>127.527.492.518</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	Predikat AKIP Perangkat Daerah	RSJD Prov Jambi	<b>BB</b>	<b>Rp.68.954.470.436</b>			<b>BB</b>	<b>79.195.863.400</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran</b>	RSJD Prov Jambi	<b>85%</b>	<b>Rp. 290.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>85 %</b>	283.500.000

1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSJD Prov Jambi	4 dok	Rp. 115.000.000	PAD		4 dok	120.750.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSJD Prov Jambi	8 dok	Rp. 135.000.000	PAD		8 dok	120.750.000
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	RSJD Prov Jambi	3 dok	Rp. 40.000.000	PAD		3 dok	42.000.000
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 44.330.525.480</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>51.022.381.400</b>
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RSJD Prov Jambi	3.300 org/bln	Rp. 44.330.525.480			3.300 org/bln	53.573.500.470
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>95%</b>	<b>Rp. 551.174.000</b>	<b>PAD</b>		<b>95 %</b>	<b>551.174.000</b>

3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	RSJD Prov Jambi	470 paket	Rp. 302.250.000	PAD		470 paket	317.362.500
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	RSJD Prov Jambi	50 orang	Rp. 248.897.000	PAD		50 orang	261.341.850
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>96%</b>	<b>Rp. 1.098.075.000</b>	<b>PAD</b>		<b>96 %</b>	<b>1.098.075.000</b>
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	RSJD Prov Jambi	45 paket	Rp. 366.025.000	PAD		45 paket	384.326.250
4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	RSJD Prov Jambi	14 paket	Rp. 439.230.000	PAD		14 paket	461.191.500
4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSJD Prov Jambi	38 laporan	Rp. 292.820.000	DAU		38 laporan	307.461.000
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>98%</b>	<b>Rp. 5.510.332.696</b>	<b>PAD</b>		<b>98 %</b>	<b>9.514.380.645</b>

		<b>Daerah yang Disediakan</b>							
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSJD Prov Jambi	4 laporan	Rp. 5.856.400	PAD		4 laporan	6.149.220
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	RSJD Prov Jambi	4 laporan	Rp. 1.234.209.496	PAD		4 laporan	1.767.900.750
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	RSJD Prov Jambi	4 laporan	Rp. 4.276.123.200	PAD		4 laporan	7.740.330.675
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>95%</b>	<b>Rp. 2.113.612.260</b>	<b>PAD</b>		<b>95 %</b>	<b>2.122.945.000</b>
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	RSJD Prov Jambi	52 unit	Rp. 585.640.000	PAD		52 unit	614.922.000

6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	RSJD Prov Jambi	2 unit	Rp. 2.113.612.260	PAD		2 unit	1.614.170.250
7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>90%</b>	<b>Rp. 50.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>90 %</b>	<b>50.000.000</b>
7.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	RSJD Prov Jambi	1 unit	Rp. 50.000.000	PAD		1 unit	52.500.000
8	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>85%</b>	<b>Rp. 17.000.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>85 %</b>	<b>15.000.000.000</b>
8.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	RSJD Prov Jambi	1 unit	Rp. 17.000.000.000	PAD		1 unit	18.000.000.000
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>86</b>	<b>Rp. 6.786.696.978</b>			<b>86</b>	<b>47.061.629.118</b>

	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan, sarana & prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi	RSJD Prov Jambi	95%	Rp. 4.526.316.978	PAD		95 %	37.254.629.118
1.1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi rasio Tempat Tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 : 1000	RSJD Prov Jambi	0 unit	-	PAD		0 unit	-
1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Yang Dilakukan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	RSJD Prov Jambi	1 unit	Rp. 3.367.427.760	PAD		1 unit	3.535.799.148
1.3	Pengadaan Sarana di fasilitas layanan kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	RSJD Prov Jambi	5 unit	Rp. 19.626.695.500	PAD		5 unit	20.608.030.275

1.4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan, Alat Penunjang Medik, Fasilitas Kesehatan Yang Disediakan	RSJD Prov Jambi	8 unit	Rp. 1.600.000.000	PAD		8 unit	1.680.000.000
1.5	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	RSJD Prov Jambi	25 unit	Rp. 250.000.000	PAD		25 unit	262.500.000
1.6	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintance center yang disediakan dan dipelihara	RSJD Prov Jambi	15 unit	Rp. 146.410.000	PAD		15 unit	153.730.500
1.7	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	RSJD Prov Jambi	40 paket	Rp. 512.435.000	PAD		40 paket	538.056.750
1.8	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	RSJD Prov Jambi	4 unit	Rp. 146.410.000	PAD		4 unit	153.730.500

		Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar							
1.9	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	RSJD Prov Jambi	2 paket	Rp4.526.316.978	PAD		2 unit	10.322.781.945
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	RSJD Prov Jambi	95%	Rp. 2.260.380.000	PAD		95 %	7.182.000.000
2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSJD Prov Jambi	4 dok	Rp. 160.000.000	PAD		4 dok	168.000.000
2.2	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	RSJD Prov Jambi	4 dok	Rp. 130.000.000	PAD		4 dok	136.500.000
2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	RSJD Prov Jambi	4 dok	Rp. 2.260.380.000	PAD		4 dok	4.882.500.000

2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAZPA yang mendapatkan Rehabilitasi Medis	RSJD Prov Jambi	24 orang	Rp. 1.900.000.000	PAD		24 orang	1.995.000.000
2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	RSJD Prov Jambi	0 dok	-	PAD			
2.6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RSJD Prov Jambi	0 orang	-	PAD			
<b>3</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>97%</b>	<b>Rp. 600.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>97 %</b>	<b>630.000.000</b>
3.1	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi dan Jaringan Internet Yang Tersedia	RSJD Prov Jambi	1 dok	Rp. 270.000.000	PAD		1 dok	283.500.000
3.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	RSJD Prov Jambi	3 alat	Rp. 330.000.000	PAD		3 alat	346.500.000
<b>4</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat</b>	<b>Persentase Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat</b>	<b>RSJD Prov Jambi</b>	<b>98%</b>	<b>Rp. 270.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>98 %</b>	<b>1.995.000.000</b>

	<b>Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan akreditasi</b>							
4.1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	RSJD Prov Jambi	1 dok	Rp. 270.000.000	PAD		1 dok	1.995.000.000

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****5.1 PENDANAAN TAHUN 2026**

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang terpenuhi</b>	<b>Jambi</b>	<b>Nilai B</b>	<b>68.954.470.436</b>	
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun</b>	<b>Jambi</b>	<b>85%</b>	<b>290.000.000</b>	
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jambi	4 dok	115.000.000	PAD
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jambi	8 dok	135.000.000	PAD
1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jambi	2 dok	40.000.000	PAD

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kegiatan Keuangan Perangkat Daerah perlengkapannya</b>	<b>Jambi</b>	<b>100%</b>	<b>44.330.525.480</b>	
2.1	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jambi	3300 org/bulan	44,330.525.480	DAU
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>Jambi</b>	<b>95%</b>	<b>551.147.000</b>	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jambi	470 paket	302.250.000	PAD
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Jambi	48 org	248.897.000	PAD
<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>Jambi</b>	<b>96%</b>	<b>1.098.075.000</b>	
4.1.	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket peralatan & perlengkapan	Jambi	42 paket	366.025.000	PAD

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	perlengkapan Kantor	kantor yang disediakan				
4.2.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan & penggandaan yang disediakan	Jambi	14 paket	439.230.000	PAD
4.3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jambi	36 laporan	292.820.000	PAD
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jambi	90 %	50.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jambi	1 unit	50.000.000	
5.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	Jambi	98%	5.510.332.969	
5.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jambi	4 laporan	5.856.400	PAD
5.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah laporan penyediaan komunikasi,	Jambi	4 laporan	1,234,209,496	PAD

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	Sumber Daya Air & Listrik	sumber daya air dan listrik yang disediakan				
05.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jambi	4 laporan	4.276.123.200	PAD
<b>6.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jambi</b>	<b>95%</b>	<b>2.113.612.260</b>	
6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jambi	50 unit	585.640.000	PAD
6.2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jambi	2 unit	2.113.612.260	PAD
<b>7.</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ</b>	<b>Jambi</b>	<b>84%</b>	<b>17,000,000,000</b>	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
7.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Jambi	1 unit	17,000,000,000	PAD
II.	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN &amp; UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</b>	Jambi	Nilai 84	6.786.696.978	PAD
1.	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelayanan, sarana &amp; prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi</b>	Jambi	95%	4.526.316.978	PAD
1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Jambi	1 unit	3.367.427.760	PAD
1.2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan, alat penunjang medik dan fasilitas kesehatan yang disediakan	Jambi	10 unit	1.600.000.000	PAD

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1.3	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Jambi	1 unit	19.626.695.500	PAD
1.3	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Jambi	25 unit	250.000.000	PAD
1.4	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintenance center yang disediakan dan dipelihara	Jambi	15 unit	146.410.000	PAD
1.4.	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (sprei, handuk dan habis pakai lainnya)	Jambi	38 paket	512.435.000	PAD
1.5	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jambi	4 unit	146.410.000	PAD
1.6.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas	Jambi	38 paket	4.526.316.978	PAD

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	kehatan lainnya yang disediakan				
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	Jambi	95%	2,260,380,000	PAD
2.1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jambi	4 dokumen	160.000.000	PAD
2.2.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jambi	4 dokumen	130.000.000	PAD
2.3	Pengelolaan Pelayanan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jambi	4 dokumen	2,260,380,000	PAD
2.4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi medis	Jambi	24 orang	1.900.000.000	PAD
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Jambi	97%	600.000.000	PAD

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
		<b>Secara Terintegrasi</b>				
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jambi	1 dokumen	330.000.000	PAD
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi dan Jaringan Internet yang Tersedia	Jambi	3 alat	270.000.000	PAD
	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jambi</b>	<b>98%</b>	<b>270.000.000</b>	<b>PAD</b>
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Jambi	1 dokumen	270.000.000	PAD

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan dokumen rencana kerja dengan waktu 1 (satu) tahun yang disusun untuk mengoperasionalkan rencana strategis SKPD ke dalam program dan kegiatan tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2026, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah menyusun program dan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan dengan mengacu pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun anggaran 2025 yang belum sempurna atau belum terselesaikan seluruhnya yang penanganannya membutuhkan beberapa tahun anggaran.